DESENTRALISASI PENUH SEGERA DITERAPKAN

TPA Regional Piyungan Ditutup dan Dipagar

YOGYA (KR) - Kebijakan desentralisasi secara penuh segera diterapkan, karena secara matematis TPA Regional Piyungan diperkirakan pada April 2024 tidak dapat menampung sampah dari Kota Yogya, Bantul dan Sleman. Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada, di TPA Regional bakal dibangun pagar BRC atau jenis pagar dengan material besi serta pagar panel beton mengelilingi lahan milik Pemda DIY.

Pemda DIY melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY melakukan peletakan batu pertama penutupan atau pemagaran TPA Piyungan serta fasilitas pengolah sampah RDF Pemerintah Kota Yogyakarta. Seremonial penutupan dan peletakan batu pertama pemagaran TPA Regional Piyungan dilakukan Selasa (5/3).

"Kami melakukan penutupan karena tidak ada ruang lagi buat timbunan sampah. Tapi perlu diketahui sebelum kita bicara penutupan, langkah-langkah konkret antara (Pemda) DIY dengan tiga wilayah (Kota Yogya, Bantul, Sleman) sudah bersiap untuk dilakukan penutupan. Selain itu rencananya juga dimulai pembangunan untuk pengolahan sampah oleh Kota Yogya yang meminta hanggar di TPA Piyungan untuk mengolah sampah agar tidak ada timbunan sampah. Sleman juga sudah siap, Bantul juga tinggal peningkatan kapasitas saja. Sehingga, tiga wilayah itu sepakat untuk menata dengan konkret," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Selasa (5/3).

Menurut Beny, untuk memperpanjang usia di TPA Regional Piyungan, kuota pembuangan sampah secara bertahap terus dikurangi. Tindakan itu dilakukan sambil menunggu kesiapan kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Tentunya semua itu akan bisa dilaksanakan dengan baik jika diimbangi dengan langkah konkret. Mengingat pascapenerapan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah, Pemda DIY masih memiliki beberapa pekerjaan rumah.

"Salah satunya terkait dengan pengolahan air lindi atau cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Apalagi ke depan, Pemda DIY berencana untuk membuat ruang terbuka hijau di kawasan TPA Regional Piyungan. Ke depan, timbunan sampah akan dipress dan dibuat menjadi bahan baku pengganti batu bara," imbuh Sekda.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti membenarkan lahan milik Pemda DIY yang berlokasi di kawasan TPA Piyungan ditutup pagar BRC dan panel beton sepanjang 3.175 meter. PUP-ESDM hanya bertugas membuat pagar karena beberapa lahan yang sudah dibeli oleh Pemda DIY harus diamankan. Pagar permanen tersebut akan dibangun mengelilingi lahan milik Pemda di mana sekarang masih tahap lelang.

"DLHK DIY akan melakukan kajian digunakan untuk apa (lahan) TPA Piyungan setelah tidak lagi digunakan untuk menampung sampah. Karena *dawuh* (perintah) Ngarsa Dalem kan sampah harus dikelola kabupaten/ kota," ungkap Anna.

Sebelumnya, Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo menyatakan, seremonial peletakan batu pertama penutupan atau pemagaran TPA Piyungan serta fasilitas pengolah sampah RDF Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2024. Dalam peringatan itu pihaknya sekaligus mencanangkan desentralisasi sampah penuh bagi seluruh wilayah DIY.

"Istilahnya masih *soft launching* menuju desentralisasi sampah penuh," ujarnya. **(Ria)-f**

35 TAHUN JUMENENGAN SULTAN HB X

Penting Memahami Nilai Budaya Tradisi

KR-Wawan Isnawan

Prof Dr Kuswarsantyo MHum

YOGYA (KR) - Atensi Sultan HB X terhadap budaya sangatlah luar biasa. Hal ini tercermin dari kebijakan beliau sebagai Raja Kraton Yogyakarta dan Gubernur DIY, khususnya di dalam kegiatan budaya yang telah diimplementasikan masyarakat melalui aktivitas upacara adat maupun bentuk kegiatan budaya yang ada di desa.

"Tentu saja ini atas arahan beliau supaya komunitas budaya yang ada di DIY bisa terus melestarikan kegiatan budaya dan mengimplementasikan di dalam kehidupan," kata Kaprodi Magister Pendidikan Seni FBSB UNY, Prof Dr Kuswarsantyo MHum terkait acara peringatan Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan HB X, yang digelar Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY.

Acara Mangayubagya 35 Tahun Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X ini akan diselenggarakan Kamis (7/3), pukul 13.00-16.00 di Pendapa Kampus III Universitas Widya Mataram (UWM), Jalan Tatabumi Selatan, Banyuraden, Gamping, Sleman, dan ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY. Acara ini akan diawali pemutaran video dokumenter, dialog keistimewaan dan musik gamelan.

Lebih lanjut dikatakan, pelestarian budaya tidak hanya sekadar *nguri-nguri* acara budayanya, tapi dampak dari acara budaya itu sendiri bisa memberikan pendidikan bagi generasi yang akan datang, bahwa penting memahami nilai-nilai budaya tradisi yang berkembang di wilayahnya masing-masing, dan ini banyak sekali jenisnya seperti upacara adat yang saat ini dikembangkan oleh desa budaya, rintisan desa budaya maupun kantung budaya yang ada di seluruh wilayah DIY.

"Semuanya telah menyiapkan potensinya untuk menunjukkan bahwa apa yang ingin disampaikan di dalam kehidupan selalu terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam upacara adat itu sendiri," katanya.

Setiap Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta juga menciptakan karya tari klasik. Begitu pula dengan Sultan HB X. Selain menciptakan Bedaya Sang Amurwabhumi (1989), Sultan HB X juga menciptakan Beksan Ajisaka (2021) dan Bedaya Sabdajati (2023).

Nilai budaya dalam beksan bedaya ini, menurut Kuswarsantyo, semuanya ada kemiripan dalam misi yang disampaikan yaitu keluhuran budi yang ingin dicapai untuk orang yang melakukan, dan juga orang yang menghayati isi dari tarian itu, sehingga implementasinya dari bedaya itu sendiri juga menjadi modal dasar untuk menjadikan kita memiliki pendidikan karakter sesuai dengan apa yang ada di dalam lampah-lampah bedaya, komposisi yang mencerminkan simbolik dari sebuah tokoh di dalam bedaya.

"Itu semua adalah gambaran-gambaran kehidupan yang divisualisasikan melalui konsep bedaya yang sudah ada," jelasnya.

Kraton sebagai pusat budaya, menurut Kuswarsantyo, menginspirasi seniman karena kraton memiliki artefak. Artefaknya bisa yang tengible maupun intengible.

"Jadi kalau kita melihat upacara adat grebeg misalnya, ada dalam rangkaian upacaranya yang menginspirasi orang untuk berkarya, berkreasi," katanya. **(Wan)**

SOAL PENGAJUAN HAK ANGKET

DPR Tegaskan Harus Penuhi Mekanisme

JAKARTA (KR) - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, usulan hak angket merupakan aspirasi yang diterima pihaknya. Namun, untuk mewujudkan hak angket ada mekanisme yang harus terpenuhi.

"Kita menampung aspirasi dari anggota yang interupsi dan kita lihat misalnya hak angket, itu kenapa kemudian kita lanjutkan dengan yang lain. Karena hak angket ada mekanismenya," ujar Dasco yang memimpin rapat paripurna tersebut di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (5/3).

Pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Syarat penggunaan hak angket ini diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, "Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi".

"Jadi kalau kawan-kawan tadi ada aspirasi hak angket kan ada mekanismenya di DPR. Jadi saya tadi lebih menanggapi masalah, misalnya tadi kekurangan beras, tadi kita langsung carikan solusinya dan dibicarakan dengan pemerintah," ujar Dasco.

Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menginterupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Ia berharap, DPR dapat benar-benar melakukan fungsi pengawasannya lewat pembentukan pansus hak angket.

Hak angket tersebut bertujuan untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Hal serupa juga diusulkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam forum yang sama.

"Untuk itu kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket. Ataupun apapun supaya kualitas pemilu ke depan itu ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi," ujar Aria Bima dalam rapat paripurna. **(Ant)-f**

15 TRUK UNTUK ANGKUT MOTOR PEMUDIK

Kemenhub Sediakan 722 Bus Mudik Gratis

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan 722 unit bus untuk program mudik gratis di tahun 2024. Dari sejumlah unit bus tersebut, Ditjen Hubdat menyediakan 30.088 kuota mudik gratis yang terdiri dari 24.368 orang untuk arus mudik dan 5.720 orang untuk arus balik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Selasa (5/3) menjelaskan, Ditjen Hubdat pada tahun ini kembali menyediakan 900 unit kuota pengangkutan motor dengan truk secara gratis.

"Disediakan kuota 450 unit untuk arus mudik dengan 15 truk dan 450 unit untuk arus balik yang diangkut dengan 15 unit truk juga. Jadi akan ada 30 unit truk," katanya.

Menurut Hendro, kota tujuan mudik dan balik tahun ini sebanyak 33 kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan serta wilayah Sumatera. Secara rinci, 3 kota tujuan di Jawa Barat yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kemudian Provinsi Jateng- DIY sebanyak 19 kota yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Sragen dan Yogyakarta.

Selanjutnya Provinsi Jawa Timur 5 Kota yaitu Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung. Di Kalimantan 2 Kota yaitu Banjarmasin dan Pangkalan Bun dan yang terakhir wilayah Sumatera 4 Kota yaitu Lampung, Palembang, Bengkulu dan Padang.

Sementara untuk kota asal arus balik terdapat di 9 kota yaitu Solo, Cirebon, Madiun, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta dan Pelembang. Sedangkan untuk lokasi tujuan mudik dan balik bagi pengangkutan sepeda motor sebanyak 5 kota yaitu Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, dan Yogyakarta.

Hendro menyebutkan, penyerahan sepeda motor untuk kegiatan arus mudik dilaksanakan pada hari Kamis (4/4) di Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang Selatan dan akan diberangkatkan pada hari Jumat (5/4).

Untuk pemberangkatan arus balik pengangkutan sepeda motor pada Minggu (14/4) dari 5 terminal tipe A yaitu kota Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta. Sedangkan pemberangkatan arus balik penumpang pada hari Senin (15/4) dari 8 terminal tipe A kota asal keberangkatan yaitu Solo, Cirebon, Madiun, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta, dan Palembang.

"Pendaftaran mudik gratis akan dibuka mulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024. Atau jika kuota sudah habis melalui aplikasi MitraDarat yang dapat terlebih dulu diunduh di Appstore atau Playstore," ungkap Hendro. **(Ati)-f**

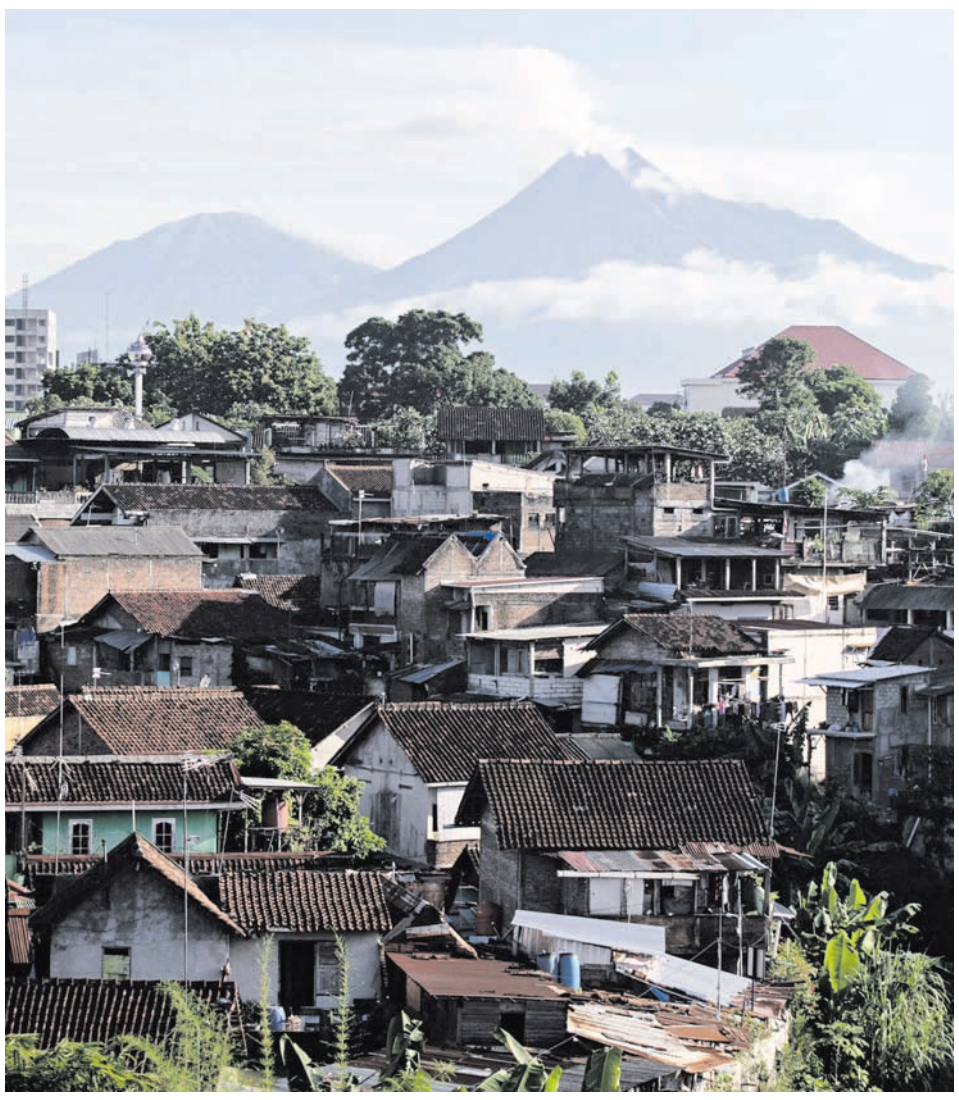

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI: Asap solfatara keluar dari kubah lava Gunung Merapi terlihat dari Jembatan Gondolayu, Yogyakarta, Selasa (5/3/2024). Menurut data BPPTKG, periode pengamatan 4 Maret 2024 telah terjadi tujuh kali erupsi dengan jarak luncur maksimal 2.600 meter dan menunjukkan peningkatan suplai magma masih berlangsung, yang hingga 5 Maret 2024 berada di tingkat aktivitas Siaga (Level III).

KORUPSI RUMAH JABATAN DPR

Tujuh Orang Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tujuh orang untuk bepergian ke luar negeri terkait penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020. Namun penyidik belum menyebut identitas tujuh orang yang dicegah tersebut.

"KPK mengajukan cegah agar tetap berada di wilayah NKRI pada pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap tujuh orang dengan status penyelenggara negara dan swasta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/3).

Namun Ali tidak menjelaskan lebih lanjut identitas tujuh orang yang dicegah ke luar negeri tersebut. Pemberlakuan cegah tersebut berlaku untuk enam bulan ke depan sampai Juli 2024 dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan.

KPK juga mengingatkan agar para pihak terkait untuk kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemanggilan pemeriksaan oleh tim penyidik. KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut.

Menurut Ali Fikri, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK. "Melalui sebuah gelar perkara, disepakati naik pada proses penyidikan terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," katanya. **(Ant/Has)-f**

PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK

Pemerintah Patuhi Keputusan MK

JAKARTA (KR) - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan pemerintah patuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang digelar sesuai jadwal, yakni 27 November.

"Keputusan MK 27 November pemerintah patuh dengan putusan tersebut," kata Hadi Tjahjanto saat ditemui di gedung MUI Menteng, Selasa (5/3).

Hadi menjelaskan, pihaknya memastikan seluruh lembaga pemilu serta partai politik untuk taat dan mengikuti mekanisme pilkada yang telah diatur MK. Ia juga memastikan kondusifitas masyarakat di seluruh daerah saat sebelum hingga pilkada.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pilkada serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara No 12/PUU-XXII/2024. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

Di UU Pilkada pasal tersebut menjelaskan, 'pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. **(Ant)-f**